



Presiden: Intensifkan Dana untuk Tangani Limbah Medis COVID-19

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo meminta jajarannya mengintensifkan dana yang ada untuk upaya menangani atau memusnahkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis COVID-19 agar tidak membahayakan.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam konferensi pers virtual sesuai rapat terbatas Pengelolaan Limbah B3 Medis COVID-19 dengan Presiden, yang dilaksanakan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu (28/7).

"Dana yang diproyeksikan untuk diolah sebesar Rp 1,3 triliun, yang diminta Presiden untuk di-exercise untuk membuat sarana-sarana incinerator dan sebagainya," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Dia menjabarkan berdasarkan data yang masuk, limbah medis COVID-19 hingga 27 Juli 2021 berjumlah 18.460 ton, yang berasal dari fasilitas layanan kesehatan, rumah sakit darurat, wisma tempat isolasi dan karantina mandiri, uji deteksi, maupun vaksinasi.

Jumlah data tersebut, menurut dia, terlihat belum lengkap. Berdasarkan penjelasan asosiasi rumah sakit limbah medis bisa mencapai 383 ton per hari.

Dia mengungkapkan fasilitas pengelolaan limbah nasional memang mencapai kapasitas 493 ton per hari, namun persoalannya limbah medis yang ada terkonsentrasi di Pulau Jawa. "Arahan Presiden semua instrumen untuk pengelolaan limbah medis harus diselesaikan," terangnya.

Limbah B3 COVID-19 yang dimaksud antara lain infus bekas, masker, botol vaksin, jarum suntik, pelindung wajah, perban, pakaian hazmat, APD, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR, antigen dan alkohol swab.

Presiden mengarahkan agar jajarannya secara intensif dan sistematis bisa memastikan pengelolaan limbah B3 COVID-19 berjalan baik. "Arahan Presiden dengan fasilitas dan dukungan anggaran yang ada, apakah dengan dana Satgas COVID-19 atau Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dana transfer daerah khusus, dan lain-lain, bisa diintensifkan untuk membangun alat-alat pemusnah, apakah incinerator, shredder dan lainnya," ujar dia.

Dia mengatakan Presiden memerintahkan hal ini segera dilaksanakan oleh jajaran bersama dengan pemerintah daerah. (ANTARA)

DIY Percepat Vaksinasi untuk Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif



ANTARA/HO-Humas Protokol Pemkab Bantul

Vaksinasi COVID-19 bagi pelaku wisata dan ekonomi kreatif di kawasan wisata Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY, Rabu (28/7).

YOGYAKARTA - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk pelaku wisata dan ekonomi kreatif, salah satunya kepada pengelola kawasan wisata Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Dinas Pariwisata setempat.

cepat dan memperluas capaian target 'herd immunity', terutama di sektor pariwisata.

"Saya berharap vaksinasi yang menyeluruh akan menjadikan para pelaku pariwisata lebih percaya diri dalam menerima kunjungan pariwisata," kata Singgih disela vaksinasi COVID-19 di Mangunan.

Menurut dia sasaran vaksinasi untuk pelaku wisata dan ekonomi kreatif di kawasan Hutan Pinus Mangunan Bantul sebanyak 510 peserta, selain itu juga ada tempat wisata lain yang jadi lokasi vaksinasi yaitu di Geosite Ngingrong, Gunung Kidul dengan sasar-

an lebih dari 500 orang.

"Pemerintah daerah juga menyelenggarakan kerja sama dengan beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman. Adapun vaksinasi yang dilakukan berlokasi di Pantai Sosor, Ngobaran serta objek wisata Obelix Hills dan Tebing Breksi," katanya.

Program vaksinasi untuk pelaku wisata dan ekonomi kreatif tersebut diselenggarakan dengan bekerja sama dengan pemda, baik provinsi, kabupaten dan kota dengan pemangku kepentingan pariwisata seperti Badan Otorita Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan beberapa penyedia fasilitas kesehatan setempat.

Ia mengatakan bahwa di Kabupaten Bantul dan kabupaten lain di provinsi DIY terdapat beragam objek wisata, yang berbanding lurus dengan jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang ada. "Karena itu sebelum objek wisata dibuka, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam kondisi imun yang baik," demikian Singgih Raharjo. (ANTARA)

Wamenag Minta Penyuluh Agama Intensifkan Sosialisasi Vaksinasi

JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi meminta para penyuluh agama mengintensifkan upaya untuk menyosialisasikan program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat.

"Sebaran COVID-19 masih tinggi, perlu edukasi publik secara intensif oleh semua pihak, tidak terkecuali penyuluh agama, utamanya terkait vaksinasi dan protokol kesehatan," katanya sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi kementerian yang diterima di Jakarta, Rabu (28/7).

Zainut mengemukakan bahwa menurut hasil survei masih banyak warga yang enggan menjalani vaksinasi COVID-19 karena berbagai alasan, karenanya Kementerian Agama menggerakkan penyuluh agama untuk mendukung sosialisasi mengenai pelaksanaan vaksinasi.

Para penyuluh agama Islam, ia mengatakan, bisa mengajak ulama, tokoh masyarakat, sampai anggota majelis taklim yang mereka bina untuk



ANTARA/Asep Firmansyah/am

Wamenag Zainut Tauhid Sa'adi

menyosialisasikan program vaksinasi.

"Rata-rata penyuluh agama Islam mempunyai hubungan baik dengan tokoh agama dan masyarakat. Mereka juga memiliki binaan majelis taklim, bahkan ada yang sampai empat atau lima majelis taklim. Ini bisa dioptimalkan dalam proses edukasi," katanya.

Ia menjelaskan pula bahwa Kemen-

terian Agama sedang mengupayakan pengoptimalan pemanfaatan rumah ibadah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan untuk mendukung percepatan peningkatan cakupan pelayanan vaksinasi.

"Pemerintah sedang menggerakkan percepatan vaksinasi. Kemenag tengah berupaya proaktif, berharap rumah ibadah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya bisa dioptimalkan dalam percepatan ini," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaquut Cholli Qurmas mengatakan bahwa pemerintah menggerakkan sekitar 50 ribu penyuluh agama yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengempayokan protokol kesehatan 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. "Mereka (penyuluh) dapat difungsikan sebagai duta kampanye penerapan protokol kesehatan," katanya. (ANTARA)

Yogyakarta Ingatkan Warung Makan Patuhi Aturan PPKM Makan di Tempat

YOGYAKARTA - Pelaku usaha kuliner khususnya warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya di Kota Yogyakarta yang sudah mendapat kelonggaran beroperasi saat PPKM diminta tetap mematuhi aturan makan di tempat.

"Aturan untuk operasional warung makan, pedagang kaki lima, warteg, dan lainnya semua sama. Kalau di aturan ditetapkan waktu makan di tempat 20 menit dan maksimal tiga orang, maka aturan itu yang akan kami tegakkan," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Agus Winarto, di Yogyakarta, Rabu (28/7).

Menurut dia, aturan mengenai operasional warung makan dan usaha sejenis sudah diatur melalui Instruksi Wali Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 yang akan berlaku hingga 2 Agustus 2021.

Agus menegaskan person-



ANTARA/HO-Satpol PP Kota Yogyakarta

Ilustrasi-Penegakan aturan protokol kesehatan di tempat usaha kuliner di Kota Yogyakarta.

el Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta akan menegakkan aturan melalui kegiatan patroli yang terus diintensifkan sejak PPKM diterapkan pada 3 Juli 2021. "Jika di lapangan ditemukan ada warung makan yang di dalamnya ada lebih dari tiga orang sedang makan, maka petugas akan melakukan tindakan. Ya, dikeluarkan terlebih dahulu. Maksimal hanya tiga orang. Tiap 20 menit harus ganti pelanggan," kata Agus.

Setiap tempat usaha kuliner hanya dibatasi menerima konsumen yang diperbolehkan makan di tempat hingga maksimal pukul 20.00 WIB, katanya. Meskipun demikian, Agus mengatakan penegakan aturan tersebut bukan pekerjaan mudah karena jumlah warung makan, PKL, dan usaha kuliner lain di Kota Yogyakarta jumlahnya cukup banyak sedangkan jumlah personel Satpol PP terbatas.

"Tentunya dibutuhkan kesadaran dan kedisiplinan dari pelaku usaha itu sendiri. Selama mereka disiplin dan tidak menjadikan aturan ini sebagai sebuah egimmicki, maka seharusnya aturan bisa dijalankan dengan baik," katanya.

Selain itu, lanjut dia, konsumen lebih disarankan untuk memesan makanan secara 'take away' karena operasional warung akan tetap diperbolehkan sesuai jam operasional awal asalkan tidak melayani makan di tempat. "Tetapi, jangan kucing-kucingan dengan petugas. Saat ada patroli, pelaku usaha terbit aturan dan saat tidak ada patroli, mereka menerima konsumen makan di tempat," katanya.

Sejak awal Juli 2021, Agus mengatakan belum memberikan sanksi dalam bentuk apa pun kepada pelaku usaha yang diketahui melanggar aturan PPKM. (ANTARA)

Arena PON XX Papua Telah Siap 100 Persen

JAYAPURA - Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua (Kadisorda) Alexander Kapisa memastikan sebagian besar pembangunan arena cabang olahraga di berbagai lokasi pertandingan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua sudah siap 100 persen.

"Pembangunan venue PON XX Papua dibangun menggunakan sumber dana APBN, APBD Provinsi Papua dan APBD Kabupaten/ Kota telah berjalan sesuai dengan jadwal," kata Alexander Kapisa di Jayapura, Rabu (28/7).

Ia mengakui, dengan rampungnya arena pertandingan PON XX Papua yang berstandar Internasional itu, maka perhelatan PON



ANTARA/Muhsidin/am

Venue cabang olahraga renang dan akuatik di kompleks stadion utama Lukas Enembe di Kampung Harapan Sentani Jayapura saat dikunjungi Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo bersama Dirjen Cipta Karya PUPR Diana Kusumastuti.

Papua juga sudah siap dilaksanakan pada Oktober 2021. Selain arena yang sudah siap, menurut Alexander

Kapisa, masyarakat di sekitar lokasi perhelatan juga sudah siap menyambut atlet-atlet terbaik seluruh Tanah Air

dari 34 provinsi se-Indonesia dengan ikut vaksinasi COVID-19. "PON XX Papua yang berlangsung di empat klaster penyelenggara harus sukses hingga selesai," ujar Alexander Kapisa.

Warga Papua mendukung penyelenggaraan PON XX dengan menyambut duta olahraga terbaik dari seluruh Indonesia dengan keramahan, kedamaian dan semangat persaudaraan.

PON XX Papua akan mempertandingkan 37 cabang olahraga yang berlangsung di empat klaster penyelenggara yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke. (ANTARA)

PEMERINTAH TAMBAH ANGGARAN BIDANG KESEHATAN

Pemerintah menyiapkan penambahan anggaran di bidang kesehatan dalam mengantisipasi lonjakan kenaikan kasus COVID-19. Penguatan anggaran ini antara lain untuk perkiraan kenaikan klaim pasien COVID-19, penambahan rumah sakit darurat, percepatan vaksinasi, hingga penebalan PPKM.

ANGGARAN PENANGANAN KESEHATAN COVID-19

| | |
|-----------|------------------|
| Pagu awal | Rp193,93 triliun |
| Perubahan | Rp214,95 triliun |

PROGRAM PENGUATAN BIDANG KESEHATAN

- Total anggaran** Rp18,4 triliun
- Tambahan** Rp17,3 triliun
- Alokasi** Rp1,08 triliun
- Target** 1,1 juta nakes pusat
- Insentif tenaga kesehatan** Rp18,4 triliun
- Insentif perpajakan kesehatan** Rp20,85 triliun
- Pembangunan/konversi RS darurat** Rp2,75 triliun
- Klaim perawatan pasien** Rp65,9 triliun
- Penambahan suplai oksigen** Rp370 miliar
- Program penebalan PPKM Mikro** Rp790 miliar
- Penyediaan obat COVID-19 isoman** Rp1,17 triliun
- Penanganan kesehatan lainnya** Rp45,93 triliun
- Vaksinasi** Rp57,84 triliun



- Perubahan** Rp214,95 triliun
- Pengadaan oksigen dari dalam dan luar negeri** Rp25,87 triliun
- Operasi penebalan PPKM Mikro oleh TNI selama 6 bulan di daerah** Rp47,6 triliun
- Penanganan kesehatan di daerah, testing, gugus tugas, dan penelitian** Rp6,6 triliun
- Kami di Kementerian Keuangan merespons (COVID-19) dengan 'whatever it takes'. Apapun kita lakukan untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian Indonesia, dan itu berimplikasi kepada defisit APBN.**
- Sri Mulyani** Menteri Keuangan